
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN PENYAJIAN PSAP NO. 2 PADA DINAS SOSIAL KOTA MALANG TAHUN 2020-2022

Oleh

Aria Wastra Boja¹, Ana Sopanah S², Endah Puspitosarie³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang

Email: ¹ariawastrab@gmail.com, ²anasopanah@gmail.com,

³puspitosarieendah@gmail.com

Article History:

Received: 05-08-2023

Revised: 14-08-2023

Accepted: 08-09-2023

Keywords:

PSAP No. 2, Budget

Realization, Effectiveness

Abstract: *This study aims to determine the conformity of the social services budget realization report in Malang City, whether it is in accordance with PSAP No. 2 as well as knowing the effectiveness of social service budget realization in Malang city. The research method used in this research is descriptive qualitative research, which is a research method that utilizes qualitative data and is described descriptively. Malang City Social Service as the object of this research. Primary data was obtained from documents contained in the Malang City Social Service. In addition, interviews were conducted with those concerned and direct observation. The results of this study indicate that Malang City is good and in accordance with the Elements of the Budget Realization Report in PSAP No. 2, starting with providing information on the realization of LRA-income in one period along with its income items, providing information on the realized expenditure budget, providing information on the realized transfer budget, providing information on the realized surplus/deficit budget, providing information on the realized surplus/deficit budget.*

PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas publik. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bersifat transparan dan akuntabilitas maka diperlukan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbasis akrual akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan perwujudan good governance serta mengetahui kinerja pemerintah. Ini dikarenakan adanya penyempurnaan jenis-jenis laporan keuangan dari semula 4 (empat) menjadi 7 (tujuh) jenis laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) serta adanya perubahan basis dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual. Dengan adanya basis akrual dapat diketahui kinerja anggaran, kinerja operasional pemerintah, perubahan kekayaan pemerintah, sumber – sumber penerimaan alokasi pengeluaran, posisi keuangan pemerintah serta arus kas pemerintah. Dengan adanya PP Nomor 71 tahun 2010 menyempurnakan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan menunjukkan perbedaan dengan pengelolaan keuangan pemerintahan sebelum adanya reformasi pengelolaan keuangan pemerintah. PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis kas menuju akrual yang didalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dinda Sari Nasution (2021) tentang Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.02 menyatakan bahwa penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dengan menerapkan teknik perhitungan daftar checklist dalam rumus Dean J. Champion kesesuaian penerapan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual telah dinilai baik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Karjono dan Riani (2020) tentang Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara sudah mengacu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas sejak tahun 2015, sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyajikan delapan komponen Laporan Realisasi Anggaran, yaitu: Pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Neto, dan Sisa Lebih/Kurang pembiayaan.

Penyusunan anggaran belanja Dinas Sosial Kota Malang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dan juga menetapkan target anggaran belanja, baik dalam konteks program dan kegiatan ataupun dana yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran belanja. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Laporan realisasi anggaran juga berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisien dan efektivitas penggunaan anggaran yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya.

LANDASAN TEORI

Akuntansi

Secara umum akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, penjabaran, penyajian data, serta pencatatan transaksi yang berhubungan dengan keuangan yang digunakan untuk proses pencatatan suatu transaksi agar lebih mudah dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan sangat perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan.

Akuntansi adalah ilmu mencatat, meringkas, menganalisis dan melaporkan data yang berhubungan dengan keuangan dalam suatu perusahaan, organisasi maupun instansi pemerintah. Akuntansi merupakan alat mengolah data menjadi informasi keuangan guna mengukur kegiatan ekonomi sehingga informasi tersebut dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. (Sopana, Fatoni, Danawanti, Puspitosarie, & Dkk, 2020)

Akuntansi Pemerintah

Secara umum akuntansi pemerintah adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengelompokan, penjabaran, penyajian data, pengikhtisaran, pengklasifikasian, pencatatan transaksi, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atau suatu informasi. Akuntansi pemerintah adalah akuntansi pemerintah meliputi aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan transaksi-transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu kesatuan dari unit-unitnya, serta penafsiran atas hasil aktivitas ini (Yogyakarta: Diandra Kreatif Angoota IKAPI, Cet. I, 2017).

Sadeli (2015: 6) menyatakan akuntansi pemerintahan termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau institusional accounting, mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya. Akuntansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Berdasarkan tujuan pemerintah, Mahmudi (2013: 7) menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Dalam akuntansi pemerintah dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal.
5. Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan diresmikan dengan undang-undang yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Indra Bastian mengatakan situasi Standar Akuntansi Pemerintahan telah cocok dengan UU Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diresmikan dengan Peraturan Pemerintah serta tiap faktor rinci pemerintah pusat serta pemerintah sekitarnya dibutuhkan buat mempraktikkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, ada 2 hasil pemberlakuan yang diidentikkan dengan norma pembukuan pemerintah, ialah Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang Pemerintah. Standar Akuntansi (SAP). PP No 71 ialah pengganti dari pedoman pembukuan pemerintah yang lama. PP Nomor 24 2005 memakai pendekatan basis kas mengarah akrual, sebaliknya PP Nomor 71 tahun 2010 memakai basis pendekatan akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual Sesuai PP 71 tahun 2010:

- 1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- 2) PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- 3) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- 4) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
- 5) PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
- 6) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
- 7) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
- 8) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
- 9) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
- 10) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban
- 11) PSAP 10 tentang Koreksi, Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- 12) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi
- 13) PSAP 12 tentang Laporan Operasional.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode realisasi dan anggaran entitas pelaporan. yang bertujuan untuk memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian targettarget yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, unsur yang dicakup oleh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Menurut Permendagri No 64 Tahun 2013, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Di dalam laporan realisasi anggaran unsur yang dicakup secara langsung terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Rancangan yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Malang dengan mengetahui lebih jelas tentang Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Malang, visi dan misi Kota Malang, dan struktur organisasi.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Pengumpulan data dengan wawancara (Interview)

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2017:318), wawancara adalah pertemuan dua orang ketika informasi dan ide dipertukarkan melalui sesi tanya jawab untuk menciptakan makna seputar isu tertentu. Dalam penelitian ini, pertanyaan dan tanggapan dilakukan langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Observasi (Pengamatan)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (Arikunto, 2002). Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

3. Dokumentasi

Menurut Suwandi dan Basrowi (2008:158) dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu dimana data dan informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan, dideskripsikan secara kualitatif. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menganalisis data sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi mengenai sistem informasi akuntansi penjualan.
2. Mereduksi data dan informasi yang telah dikumpulkan guna memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data dan informasi selanjutnya.
3. Menyajikan data dan informasi yang telah direduksi guna mempermudah memahami apa yang terjadi dalam penelitian.
4. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis data dan informasinya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan sistem Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor Dinas Sosial Kota Malang apakah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 diatur bahwa dalam Laporan Realisasi Anggaran harus menyajikan item-item yang diantaranya item pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Dalam pencatatan pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, yang mana pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/daerah, belanja berasal dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga, belanja operasi diperoleh dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial, dan sedangkan belanja modal berasal dari belanja tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset tetap lainnya.

Menurut Halim dan Kusufi, laporan realiasi anggaran menyediakan informasi yang

berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai.

- 1) Pendapatan-LRA
- 2) Belanja
- 3) Transfer
- 4) Surplus/Defisit-LRA
- 5) Pembiayaan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Tabel 1 Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota/ Dinas Per 31 Desember

No	Uraian	Anggaran 20 x 1	Realisasi 20 x 1	(%)	Realisasi 20 x 0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	Xxx	Xx	Xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	Xxx	Xx	Xxx
5	Pend. Hasil pengelolaan kekayaan lain-lain PAD yang sah	xxx	Xxx	Xx	Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Xxx	Xx	Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	Xxxx	Xx	Xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	Xxx	Xx	Xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	Xxx	Xx	Xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	Xxx	Xx	Xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	Xxx	Xx	Xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer dan Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	Xxxx	Xx	Xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	Xxx	Xx	Xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	Xxx	Xx	Xxx
20	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	Xxxx	Xx	Xxxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	Xxx	Xx	Xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	Xxx	Xx	Xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	Xxxx	Xx	Xxxx
26	Total Pendapatan Transfer	xxxx	Xxxx	Xx	Xxxx

Analisis Efektifitas Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2020 - 2022 di Kantor Dinas Sosialis Kota Malang

Tabel dibawah ini merupakan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Malang.

Tabel 2 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Malang

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2020	40.838.809.347	29.861.532.138	10.977.277.208
2	2021	49.781.961.000	41.587.568.880	8.194.392.119
3	2022	58.223.290.004	43.083.509.842	15.102.723.704

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk anggaran tahun 2020 dari pos belanja pada Kantor Dinas Sosial Kota Malang sebesar Rp. 40.838.809.347. Untuk penyerapan anggaran

pada laporan realisasi anggaran untuk pos belanja hanya terserap sebesar Rp. 29.861.532.138. Pada tahun 2021 anggaran dari pos belanja pada Kantor Dinas Sosial Kota Malang sebesar Rp. 49.781.961.000. dengan penyerapan anggaran pada laporan realisasi anggaran untuk pos belanja hanya terserap sebesar Rp. 41.587.568.880. Lalu pada tahun 2022 anggaran dari pos belanja pada Kantor Dinas Sosial Kota Malang sebesar Rp. 58.223.290.004 penyerapan anggaran pada laporan realisasi anggaran untuk pos belanja hanya terserap sebesar Rp 43.083.509.842

Perhitngan Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

$$Efektifitas = \frac{Realisasi}{Anggaran} \times 100\%$$

$$Efektifitas (2020) = \frac{29.861.532.138}{40.838.809.347} \times 100\% = 73,12\%$$

$$Efektifitas (2021) = \frac{41.587.568.880}{49.781.961.000} \times 100\% = 83,54\%$$

$$Efektifitas (2022) = \frac{43.083.509.842}{58.223.290.004} \times 100\% = 74\%$$

Sumber: Data yang Diolah Peneliti

Pembahasan

Penerapan sistem Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor Dinas Sosial Kota Malang apakah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02

“Penyusunan laporan realisasi anggaran berawal dari transaksi belanja yang dibuatkan surat pertanggungjawaban (SPJ) oleh bendahara pengeluaran dan kemudian dokumen SPJ tersebut diinput oleh bagian akuntansi, sehingga laporan akhirnya berupa laporan realisasi anggaran. Untuk realisasi belanja Dinas Sosial Kota Malang ini mengalami kendala disebabkan masih tidak terlaksananya sebagian kegiatan serta pembiayaan akibat pandemi covid-19 dan belum terlaksananya sebagian belanja barang pada Dinas Sosial Kota Malang dan ada pula beberapa kegiatan yang harus dibatalkan akibat pandemi covid-19.” Jelas Ibu Lukiana Siswati (Kassubbag Keuangan Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Malang)

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Teguh Prasetyo dan Ibu Lukiana Siswati dapat diambil kesimpulan. Penyusun anggaran Kantor Dinas Sosial sudah dijalankan dengan baik dan di koordinasi langsung oleh Kepala Dinas dan diserahkan ke bagian akuntansi DPKAD atau Dinas Keuangan.

Tingkat Efektifitas Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2020 - 2022 di Kantor Dinas Sosisal Kota Malang

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2018 realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 40.838.809.347 dan realisasinya sebesar Rp. 29.861.532.138 pada data tersebut di hitung tingkat efisiensi anggaran belanja dengan menggunakan rumus realisasi belanja langsung bahagi realisasi belanja di kali 100% dan pada tahun 2020 hasilnya

tingkat efisiensi dari anggaran belanja yang ada di Dinas Sosial Kota Malang di dapat sebesar 73,12%. Jadi pada hasil yang di dapat di atas sebesar 73,12 % dari sudut pandang tingkat efisien ini bahwa di pandang masuk dalam kriteria kurang efektif.

Pada tabel di atas dapat dilihat juga tahun 2021 realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 58.223.290.004 dan realisasinya sebesar Rp. 41.587.568.880 pada data tersebut di hitung tingkat efisiensi anggaran belanja dengan menggunakan rumus realisasi belanja langsung bahagi realisasi belanja di kali 100% dan pada tahun 2019 hasilnya tingkat efisiensi dari anggaran belanja yang ada di Dinas Sosial Kota Malang di dapat sebesar 83,54 %. kriteria tingkat. Jadi pada hasil yang di dapat di atas sebesar 83,54 % dari sudut pandang tingkat efisien ini bahwa di pandang masuk dalam kriteria cukup efektif.

Pada tabel di atas dapat dilihat juga tahun 2022 realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 58.223.290.004 dan realisasinya sebesar Rp. 43.083.509.842 pada data tersebut di hitung tingkat efisiensi anggaran belanja dengan menggunakan rumus realisasi belanja langsung bahagi realisasi belanja di kali 100% dan pada tahun 2019 hasilnya tingkat efisiensi dari anggaran belanja yang ada di Dinas Sosial Kota Malang di dapat sebesar 74 %. kriteria tingkat. Jadi pada hasil yang di dapat di atas sebesar 74 % dari sudut pandang tingkat efisien ini bahwa di pandang masuk dalam kriteria kurang efektif. Jadi secara keseluruhan pada tahun 2020 sampai 2022 hasil yang di dapat yaitu kurang efektif dan sering mengalami hasil naik turun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis laporan realisasi anggaran diatas maka dapat diketahui penerapan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Malang sudah sangat baik sesuai dengan Unsur-Unsur Laporan Realisasi Anggaran pada PSAP No. 2, dimulai dengan menyediakan informasi realisasi pendapatan-LRA dalam satu periode beserta pos-pos pendapatannya, menyediakan informasi anggaran belanja terealisasi, menyediakan informasi anggaran transfer terealisasi, menyediakan informasi anggaran surplus/defisit terealisasi, menyediakan informasi anggaran surplus/defisit terealisasi

Tingkat efektif anggaran dana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Malang pada tahun 2020 dinilai kurang efektif dengan persentase sebesar 73,12%, lalu pada tahun 2021 cukup efektif dengan persentase sebesar 83,54%, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan Kembali dengan persentase sebesar 74%. hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan disimpulkan berdasarkan tingkat kriteria efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, tentang kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah Saifuddin dan Masgul Abdullah (2022). "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Interpretif Pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan)"
- [2] Albertus Karjono dan Riani Sulistianingsih (2020). "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Pada

-
- Kantor Suku DinasPerhubungan)”
- [3] Albi Anggito & Johan setiawan, S. (2018). *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak
- [4] Christine M.S Tatang, Winston Pontoh dan Peter M. Kapojos (2022). "Evaluasi Penerapan Psap No. 02 Atas Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado)”
- [5] Dinda Sari Nasution (2021). "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (Psap) No.02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal)”
- [6] Drs. Arsan Latif, M. Si, Rikie, Yanuar Andriyana, Kuswanto, Hilman Rosada, Ajie Cakra Maulana (2019) “Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah”. Jakarta: Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri 2019
- [7] Eunike Sofia Manoppo dan Stanley Kho Walandouw (2019). “Analisis penyusunan rencana kerja anggaran (RKA-SKPD) pada badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
- [8] Judisty Kaumbang, Sifrid S. Pangemanan dan Heince R. N. Wokas (2015). Analisis penyusunan anggaran pada kantor kelurahan karame Kecamatan Singkil Kota Manado tahun anggaran 2014”
- [9] Kementerian Keuangan RI (2010). “Laporan keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009 “. Jakarta
- [10] Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Edisi 2019. “Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia”
- [11] Moleong, Lexy. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- [12] Nuramalia Hasanah, Ahmad Fauzi (2017). " Akuntansi Pemerintahan". Jakarta: In Media.
- [13] Riska Korompot dan Agus T. Poputra. (2015). “Analisis penyusunan anggaran pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Kotamobagu tahun anggaran 2014”
- [14] Sandu Siyoto, S.M., & M. Ali Sodik, M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media
- [15] Yesi Mutia Basri dan Gusnardi (2021). "Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)”

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN